

**“PENGARUH POLITIK IDENTITAS GENDER DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020”**

Skripsi

Oleh

**Muhammad Zulfikar Suhardi**

**E11116513**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

LEMBAR PESETUJUAN

SKRIPSI

“PENGARUH POLITIK IDENTITAS GENDER DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020”

Dipersiapkan dan disusun oleh :

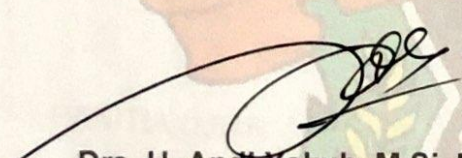
MUHAMMAD ZULFIKAR SUHARDI

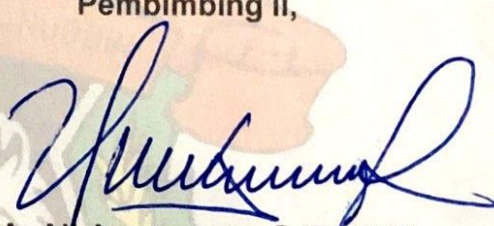
E 11116513

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

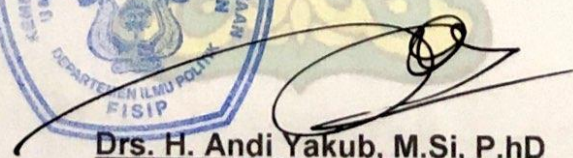
  
Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D  
NIP. 196212311990031023

  
A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si  
NIP. 198011142008121003

Mengetahui,

Ketua Departemen  
Ilmu Politik FISIP Unhas



  
Drs. H. Andi Yakub, M.Si, P.hD  
NIP. 196212311990031023



LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

PENGARUH POLITIK IDENTITAS GENDER DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Muhammad Zulfikar Suhardi**

**E11116513**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian  
skripsi pada departemen ilmu politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui :

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. H. A. Yakub, M.Si.,Ph.D


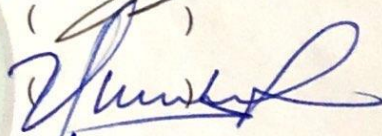

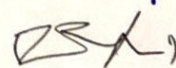
Sekretaris : A. Ali Armunanto, S.Ip.,M.Si

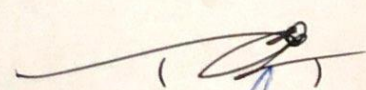
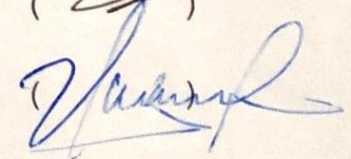
Anggota : Dr. Phill. Sukri, M.Si

Anggota : Andi Nuharuddin, S.Ip.,M.Si

Pembimbing I : Drs. H. A. Yakub, M.Si.,Ph.D

Pembimbing II : A. Ali Armunanto, S.Ip.,M.Si

()  
()  
()  
()

()  
()

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ZULFIKAR SUHARDI

NIM : E11116513

Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Politik Identitas Gender Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau melakukan kutipan tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Nopember 2020



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul **“Pengaruh Politik Identitas Gender Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan berbagai dinamika yang dihadapi, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak dapat dipungkiri, tantangan serta hambatan juga menjadi kawan berproses selama penyusunan skripsi ini. Akan tetapi hal tersebut yang lebih menguatkan usaha, niat serta tekad yang kuat dalam waktu penyelesaiannya. Dukungan serta doa dari berbagai pihak juga menjadi penyemangat bagi penulis selama menjalanio masa perkuliahan hingga pada penyelesaian masa studi akhir di Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, izinkan juga penulis memberikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terkira kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suhari Duka dan Harsinah Suhardi yang telah melahirkan serta mendidik penulis sehingga dapat tumbuh dan berkembang seperti saat ini. Terima kasih banyak atas segala cinta dan kasih sayang, dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih atas nilai-nilai kehidupan yang senantiasa diberikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah SWT membalas-Nya dan selalu memberi perlindungan-Nya.

Teriring ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekan lainnya.
3. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph,D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Sekaligus menjadi pembimbing 1 penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang telah memberikan masukan, gagasan, serta pemikiran dari awal hingga akhirnya bisa terselesaikan.
4. Bapak A. Ali Armunanto S.IP. M.Si selaku Pembimbing 2 sekaligus Pembimbing Akademik (PA) penulis selama menjadi mahasiswa yang tak pernah lelah membantu mengarahkan, membimbing dan memberikan nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di



Universitas Hasanuddin.

6. Kepada seluruh Bapak/Ibu Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam segala urusan penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Hasanuddin.
7. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Ibu Sutinah Suhardi selaku calon Bupati Mamuju, Bapak Reza Morunga selaku Ketua Tim Pemenangan Tina-Ado, Bapak Hairil Amri selaku Founder Cerita Demokrasi, Bapak Abdul, Bapak Melki, Bapak Rasyid Kampil, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan penulis.
8. Terima kasih kepada saudara penulis Kakak Sutinah Suhardi, Suraidah Suhardi, Sulfia Suhardi, Sufliha Suhardi, Suryani Suhardi, dan Adik Nurfaidah Suhardi yang selalu memberikan dukungan untuk meraih cita-cita.
9. Terima kasih kepada Tunangan penulis Dinda Regita Cahyani yang selalu menemani dan memberikan dukungan serta motivasi untuk bisa menyelesaikan masa perkuliahan.
10. Terima kasih kepada teman-teman Marvelous Ilmu Politik Angkatan 2016 yang menjadi kawan dan sahabat selama masa perkuliahan.
11. Terima kasih kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional Jepang Gel. 102 Grup C Muhammad Adhim Riangdi,

12. Muhammad Arya Azzurba, Arfandy Arman, Asriyandi Catur Putra, Naufal Alviansyah, Arief Iskandar, Muhammad Anugerah, Iftahul Muflihin, M. Nur Mufaddal, Muh. Fathur Rachman, Adrianus Dipo, Muh. Ariandy, Dirvan Wahyudi, Malfin Malik, Rachmat Setiawan, Angga Atrie, Valentini Febriani B Lande, Aqilla Ramadhani, Melsyana Gosal, Narumi Ramadhani, Arlita Reggiana, Karina Elisabeth Lande, Tamara D Harun, Namirah Aisyah, Cheeryll Fhariza, Andi Alisa, Aqilla Nadya. Terima kasih untuk semua cerita dan pengalaman selama proses pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Fukuoka dan Tokyo Jepang. Semoga waktu tetap sudi untuk mempertemukan.

13. Terima kasih teman-teman Sospol angkatan 2016 yang selalu berbagi canda dan tawa melewati dingin dan malamnya suasana kampus. Semoga kelak kita kembali ke biru kuning sebagai orang-orang sukses yang membanggakan. Salam bersama, bersatu, berjaya.

14. Terima kasih dan apresiasi tertinggi untuk diri sendiri yang telah mampu bertahan melewati berbagai rintangan dan tantangan selama ini.

Dengan berserah dan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dan atas segala pertolongan dan hikmat dari pada-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Strata-1 di Universitas Hasanuddin Makassar. Semoga segala kebaikan dan bantuan dari setiap orang yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dapat bernilai ibadah dan diterima disisi Yang Maha Kuasa. Dengan



harapan yang besar, melalui skripsi ini kiranya dapat membantu dan memberi manfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca.

Makassar, November 2020

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
KATAPENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Penelitian Terdahulu.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan tentang Teori Identitas .....	12
2.2 Teori Budaya Politik.....	16
2.3 Kesetaraan Gender Dalam Realitas Politik .....	22
2.4 Pemilihan Kepala Daerah.....	24

2.5 Kerangka Pikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	31
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.3 Lokasi Penelitian .....	33
3.3.1 Gambaran Umum Kabupaten Mamuju .....	34
3.3.2 Gambar Wilayah Administrasi Kabupaten Mamuju .....	35
3.3.3 Kondisi Topografi Kab. Mamuju.....	36
3.3.4 Iklim Kabupaten Mamuju .....	37
3.3.5 Kependudukan .....	37
3.3.6 Pendidikan di Kabupaten Mamuju .....	38
3.3.7 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mamuju .....	39
3.3.8 Sebaran Kecamatan di Kabupaten Mamuju .....	40
3.3.9 Gambaran Umum Kecamatan Mamuju .....	44
3.4 Informan Penelitian .....	45
3.5 Jenis Data .....	46
3.6 Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>48</b>
4.1 Data Statistik Mengenai Pilkada Kabupaten Mamuju Tahun 2020	48
4.1.1 Jumlah IPS di Kabupaten Mamuju.....	48
4.2 Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju .....	49
4.3 Jumlah Pemilih Pilkada Kabupaten Mamuju 2020 .....	53

4.4	Kepemimpinan Perempuan Dalam Pilkada Kabupaten Mamuju 2020 .....	55
4.4.1	Profil Singkat Calon Bupati Perempuan Kabupaten Mamuju 2020 (Sutinah Suhardi).....	55
4.4.2	Visi Misi Calon .....	57
4.5	Penerimaan Masyarakat Terhadap Calon Bupati Perempuan .....	63
4.6	Kontribusi Kultural dan Preferensi Pemilih di Kabupaten Mamuju	71
	<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	77
5.1	Kesimpulan .....	77
5.2	Saran.....	79
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.3.1	Luas dan Jarak Menuju ke Ibukota Masing-masing Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat .....	34
Tabel 3.3.2	Kondisi Topografi Kabupaten Mamuju .....	34
Tabel 3.3.3	Jumlah Penduduk Berbagai Kecamatan di Kab. Mamuju .....	35
Tabel 3.3.4	Jumlah Murid Berbagai Jenjang Pendidikan di Kab. Mamuju .....	36
Tabel 3.3.5	Persentase Penduduk Miskin di Kab. Mamuju .....	38
Tabel 3.3.6	Daftar Kecamatan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat	39
Tabel 4.3.1	Jumlah Pemilih Pilkada Kabupaten Mamuju 2020 .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Pikir. ....	28
Gambar 3.3.2	Wilayah Administrasi Kabupaten Mamuju .....	33

## ABSTRAK

**Zulfikar Suhardi, Nomor Induk Mahasiswa E11116513, departemen ilmu politik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas hasanuddin, menyusun skripsi yang berjudul “pengaruh politik identitas gender dalam pemilihan kepala daerah kabupaten mamuju tahun 2020” dibawah bimbingan Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, PhD selaku pembimbing 1 dan Bapak A. Ali Armunanto, S.IP, M, Si selaku pembimbing 2**

Penelitian Ini Bertujuan Untuk mengetahui pengaruh politisasi isu gender sebagai alat politik serta faktor-faktor apa saja yang dapat membentuk preferensi pilihan masyarakat terhadap calon bupati perempuan dalam pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Mamuju.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis gambaran serta kondisi perpolitikan dalam rangka menuju pemilihan kepala daerah di kabupaten mamuju terkhususnya pada isu politik identitas gender dengan majunya calon pemimpin perempuan dalam proses kontestasi. lebih jauhnya lagi, dalam penelitian ini akan menjabarkan visi misi, program kerja, profil serta hasil terkait penerimaan masyarakat terhadap calon Bupati perempuan dan peranan beberapa aspek yang nantinya akan menjadi evaluasi bagi calon pemimpin perempuan dalam menyiapkan strategi yang lebih matang dalam menyambut proses pemilihan kepala daerah di kabupaten mamuju tahun 2020.

**Kata Kunci :** Pilkada, Identitas Gender, Pemimpin.

## **ABSTRACT**

**Zulfikar Suhardi, Student Master Number E11116513, Department of Political Science, Faculty of Social Sciences And Political Science, Hasanuddin University, Compiled a Thesis Entitled "Influence of Gender Identity Politics In The Election Of The Head Of Mamuju District in 2020" Under The Guidance Of Mr. Drs. H. Andi Yakub, M.Si, PhD. As 1st Supervisor and Mr. A. Ali Armunanto, S.IP, M, Si. As 2nd Supervisor.**

This research aims to find out the influence of politicization of gender issues as a political tool as well as what factors can shape people's choice preferences towards female regent candidates in the election of the Regional Head in Mamuju Regency.

The research approach used in this study is a qualitative approach. The use of this qualitative approach is done to know, understand and analyze the picture and condition of politics in order to the election of regional heads in mamuju district especially on the issue of gender identity politics with the advancement of female leadership candidates in the contest process. Furthermore, in this study will describe the mission vision, work program, profile and results related to community acceptance of female regents and the role of several aspects that will later be evaluated for prospective female leaders in preparing a more mature strategy in welcoming the process of electing regional heads in mamuju district in 2020.

**Keywords:** Election, Gender Identity, Leader.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berbagai isu dalam tatanan kehidupan negara dan masyarakat Indonesia kini selalu dikaitkan dengan demokrasi. Demokrasi menurut Schumpeter merupakan kehendak rakyat dan kebaikan bersama. Mayo (dalam Budiarto, Miriam 2008) berpendapat bahwa demokrasi adalah ketika kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan. Seperti halnya dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian dari demokrasi yang ada di Indonesia, serta menjadi bagian dari perjalanan panjang yang dimana adanya tarik menarik kepentingan-kepentingan dari masyarakat, elite, pemerintah pusat dan kepentingan pihak-pihak lainnya.

Dalam setiap adanya pemilihan kepala daerah akan selalu ada peristiwa dimana akan muncul dan berkembang isu-isu di masyarakat baik itu untuk mendukung ataupun menyerang lawan politik, baik itu isu agama, etnis, budaya, *black campaign* dan berbagai isu lainnya. Hal tersebut kemudian membentuk suatu identitas baru yang mewarnai wajah perpolitikan dalam demokrasi di Indonesia pada setiap proses pemilihan yang dilakukan. Pembentukan identitas tersebut dapat terbentuk baik secara parsial maupun secara interaksial. Hal inilah yang kemudian melahirkan perubahan sosial ekonomi, sosial politik, sosial itu sendiri dan sosial budaya. Tidak hanya sampai disitu saja, kini pembahasan tentang

politik identitas dalam berdemokrasi terus bergulir hingga pada isu gender dan alam, agama, bahasa, termasuk ras dan etnis terus menjadi bahan kajian dalam politik identitas itu sendiri. Sudah banyak peristiwa dalam proses pemilihan kepala daerah di Indonesia di saat-saat ini yang menggiring isu- isu tersebut sebagai senjata utama dalam memenangkan medan kontestasi. Menurut Jeffrey Week Politik Identitas adalah berkaitan dengan *belonging* tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas. Politik identitas dianggap dapat merepresentasikan kemanusiaan melalui penggambarannya akan individu terhadap *liyan* (manusia lainnya/individu lainnya). Oleh sebab itu politik identitas diklaim bergulir secara universal dan merupakan bagian dari politik kebudayaan<sup>1</sup>.

Kabupaten Mamuju merupakan salah satu daerah yang strategis di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Selain karena jumlah penduduknya, juga karena merupakan ibukota provinsi dari Sulawesi Barat yang artinya bahwa Kabupaten Mamuju termasuk kedalam daerah yang memiliki keragaman penduduk, mulai dari keragaman agama, suku, etnis, dan budaya. Hal ini menjadikan dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Mamuju menjadi menarik untuk diperhatikan karena selain beberapa hal yang telah

---

<sup>1</sup> T.P, *Politik Identitas*, <http://digilib.unila.ac.id/2203/9/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 22 Mei 2020

terjelaskan diatas, di Kabupaten Mamuju juga terdapat kekuatan politik elit lokal yang masih menjadi salah satu kekuatan politik di Sulawesi Barat utamanya Kabupaten Mamuju.

Pemilihan kepala daerah secara langsung tentu berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam memberikan dukungan kepada pasangan yang akan mengikuti kontestasi. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini bisa menggambarkan perilaku politik hingga membentuk cara pandang dari masing-masing pemilih yang bisa saja terbentuk atas didasari oleh banyak hal, mulai dari budaya, agama, etnis, suku, ataupun lingkungan sosial sekitar dan hal lainnya.

Melihat kebelakang dengan sejarah kepemimpinan yang ada di Kabupaten Mamuju, selama kabupaten ini terbangun, belum pernah ada sosok pemimpin perempuan di Kabupaten Mamuju, dan baru-baru ini muncul seorang perempuan yaitu Sutinah Suhardi yang akan maju sebagai calon Bupati Kabupaten Mamuju. Hal ini tentu menjadi menarik karena dengan majunya Sutinah sebagai calon Bupati berarti akan memunculkan dan membangkitkan partisipasi perempuan di dunia politik tanah air. Seperti diketahui bahwa masih kuatnya pemahaman-pemahaman masyarakat mengenai tabunya seorang wanita menjadi seorang pemimpin akan menjadi sebuah tantangan tersendiri dan menjadi problematika tersendiri bagi Sutina Suhardi.

Salah satu argumentasi yang juga menyebabkan kaum perempuan sulit untuk menjadi pemimpin dalam dunia politik adalah adanya Q.S al-

Nisa' ayat 34. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum laki-laki lebih tegak atas wanita. Sebab, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya.<sup>2</sup>

Hal inilah yang melahirkan doktrin mengenai batasan-batasan untuk kaum wanita. Apa lagi dengan muslim atau agama islam menjadi mayoritas dalam suatu daerah maupun suatu negara, tentunya akan sangat mempengaruhi suatu doktrin dalam sebuah wilayah.

Namun, ternyata hal ini juga memberikan warna baru dalam proses pemilihan kepala daerah karena akan terjadi pertarungan antara perempuan dan laki-laki. Dengan latar belakang yang dimiliki Sutinah sebagai anak dari mantan Bupati Mamuju terdahulu selama 2 periode tentu memberikan kepercayaan diri.

Secara konstitusional laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 pasal 28 yang menegaskan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Undang-undang tersebut merupakan cerminan dari negara demokrasi yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk berkiprah, termasuk perempuan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.nu.or.id/post/read/39995/menggagas-pemimpin-perempuan>

<sup>3</sup> Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), hal. 3



Selanjutnya, Pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum<sup>4</sup>, dapat dikatakan bahwa perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak khusus di bidang politik yang sifatnya sementara (*affirmative action*) telah tercapai. Pada satu sisi kebijakan ini sesungguhnya sangat menguntungkan bagi kaum perempuan di Indonesia, sebab dengan kebijakan amandemen Undang-undang tersebut, perempuan dapat meningkatkan partisipasi politiknya yang terlihat dalam peningkatan representasi perempuan di parlemen sekurang-kurangnya 30 persen. Hal ini tercermin secara implisit pada Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mencalonkan anggota DPR/DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”.

Namun pada sisi yang lain, justru akan menjadi kendala bagi perempuan itu sendiri, institusi-institusi yang akan mereka tempati manakala kesiapan dan penerapannya tidak sejalan dengan tuntutan dari kebijakan Undang-undang tersebut.

Menurut Tari Siwi Utami<sup>5</sup>, upaya maksimal pemberdayaan perempuan semacam itu menunjukkan adanya *political will* dari pemerintah yang apresiatif terhadap perkembangan pengarusutamaan gender dalam

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu 2004.

<sup>5</sup> Trisakti Handayani & Sugiarti. 2002, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. [Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press], hal. 13.

pergulatan politik nasional. Hal ini bisa dilihat sebagai perkembangan yang cukup menggembirakan bagi aktivis perempuan yang *concern* terhadap pengarusutamaan gender dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa selama Orde Baru pemberdayaan perempuan ini diwarnai dengan pembisuan dan kooptasi organisasi-organisasi perempuan serta seluruh organisasi independen lainnya. Bercokolnya lembaga Dharma Wanita atau PKK yang mengkoordinir karya perempuan pada masa orde baru menjadi saksi adanya kooptasi rezim orde baru dalam melanggengkan domestifikasi perempuan.

Sebagai suatu konsep yang sangat mendasar, identitas tentunya menjadi basis untuk pengenalan sesuatu hal. Kita akan mengenali sesuatu halnya itu kalau kita tahu identitasnya. Ini juga akan berarti bahwa kalau kita mengenali identitas sesuatu hal, maka kita akan memiliki pengetahuan akan sesuatu halnya itu. Penguatan identitas politik dan representasi politik pun secara otomatis muncul sebagai dampak dibukanya kran partisipasi politik yang dimulai sejak era reformasi hingga sekarang. Merujuk dari tulisan Muhtar Haboddin menyebutkan bahwa menguatnya politik identitas di ranah lokal terkhusus di Kabupaten Mamuju terjadi bersamaan dengan politik desentralisasi pasca penetapan UU No. 29/1999.<sup>6</sup> Norma *genderless* yang diajukan untuk melihat konstruksi gender sendiri dihadirkan sebagai identitas alternatif atau bahkan utopia yang memungkinkan suatu masyarakat terbebas dari stereotip, prasangka dan aturan yang harus

---

<sup>6</sup> Muhtar Haboddin, *Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal*, [Yogyakarta 2012] hal.

dipenuhi dari tiap kategori gender, membongkar tembok-tembok pembatasnya.<sup>7</sup>

Dengan menganalisis persoalan-persoalan yang telah dijabarkan, penulis kemudian tertarik mengkaji permasalahan tentang bagaimana pengaruh identitas gender dalam kontestasi politik di Kabupaten Mamuju terlebih dalam proses pemilihan kepala daerah yang diadakan. Penulis kemudian mengangkat judul **“Pengaruh Politik Identitas Gender Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam penelitian ini maka peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerimaan masyarakat mamuju terhadap calon Bupati perempuan?
- 2) Bagaimana kontribusi kultural dalam membentuk preferensi pilihan masyarakat terhadap calon bupati perempuan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh politisasi isu gender sebagai alat politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mamuju.

---

<sup>7</sup> Hana Farida, *MENEROPONG GENDER MELALUI KACAMATA GENDERLES: SEBUAH PEMBACAAN BUTLERIAN TERHADAP ANCILLARY JUSTICE KARYA ANN LECKIE*, Alumni Universitas Gadjah Mada, Jurnal Poetika Vol. IV No. 1, Juli 2016

- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat membentuk preferensi pilihan masyarakat terhadap calon bupati perempuan Kabupaten Mamuju.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah menjadi acuan bagi pembaca atau masyarakat untuk mengetahui apa efek yang akan diberikan dari penggunaan sentimen politik identitas gender dalam upaya untuk meraih simpati masyarakat dalam pemilihan bupati di Kabupaten Mamuju.

- 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana perkembangan dinamika politik di Indonesia terutama mengenai Politik Identitas. Utamanya di Kabupaten Mamuju.

- 3) Manfaat metodologis

Secara metodologis penelitian ini diharapkan mampu lebih mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis, serta nantinya hasil penelitian tersebut dapat diberikan kepada calon Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 (Sutina Suhardi) sebagai acuan dalam menghadapi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah.

## 1.5 Penelitian Terdahulu

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Judul “POLITIK IDENTITAS GENDER DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DKI Jakarta” oleh Andy Prima Sahalatusa Mahasiswa fakultas pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, dalam penelitian ini ada beberapa kesamaan dari metode yang digunakan namun pada hal lainnya sangatlah berbeda, mulai dari tempat diadakan penelitian atau objek penelitian hingga pada hasil penelitiannya. Selain itu Andy Prima Sahalatusa fokus dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Politisasi Identitas sebagai alat politik dalam mengambil simpati publik sedangkan penulis dalam hal ini menitik beratkan kepada bagaimana penerimaan masyarakat mamuju terhadap calon Bupati perempuan dan bagaimana kontribusi kultural dalam membentuk preferensi pilihan masyarakat terhadap calon bupati perempuan.

Selanjutnya objek penelitian fokus pada pasangan calon dan giatnya dalam menarik pandangan positif masyarakat sedangkan penulis disini objeknya adalah seseorang yang berbeda gender dan juga menyinggung mengenai problematika gender dengan stereotipe masyarakat pada umumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

#### 2.1 Tinjauan tentang Teori Identitas

Menurut Richard Jenkins, "*identitas merupakan bagian integral dari kehidupan sosial. Hanya dengan membedakan identitas kelompok yang berbeda bahwa orang dapat mengkategorikan kepada orang lain*". Identitas pada awalnya berkembang sebagai hasil dari proses kategorisasi. Berdasarkan persamaan dan perbedaan dari masing-masing obyek. Ketika dilakukan dalam konteks sosial maka proses kategorisasi sosial (pengelompokan masyarakat berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki bersama oleh suatu kumpulan individu) akan terjadi dalam kondisi sang subjek (individu perilaku kategorisasi) sendiri berada dalam kategorisasi tersebut.<sup>8</sup>

Identitas terbentuk atas dua faktor yaitu; *pertama*, faktor internal yang memaknai apa yang kita pikirkan tentang identitas kita sendiri dan *kedua*, faktor eksternal yang memaknai bahwa bagaimana orang lain melihat kita dan bereaksi terhadap keberadaan kita. Mungkin muncul reaksi berbentuk penolakan, pembiaran atau mendukung dan memperkuat

---

<sup>8</sup> Nasrullah Riyanto, *Proses Pembentukan Identitas Sosial Masyarakat Eropa: Sebuah Pendekatan Psikologi Politik*, ( Tesis S2 UI: Jakarta, 2006), h. 40.

pandangan pihak luar tentang identitas diri tersebut. Jadi bagaimanapun, identitas itu muncul dari hubungan diri kita dengan orang lain. Identitas terbentuk akan adanya kestabilan dalam hubungan dialektis antara faktor-faktor internal dan eksternal yang berinteraksi untuk menghasilkan sebuah identitas.<sup>9</sup>

Erikson (1968) juga menjelaskan bahwa identitas sebagai perasaan subjektif tentang diri yang konsisten dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam berbagai tempat dan berbagai situasi sosial, seseorang masih memiliki perasaan menjadi orang yang sama. Sehingga, orang lain yang menyadari kontinuitas karakter individu tersebut dapat merespon dengan tepat. Sehingga, identitas bagi individu dan orang lain mampu memastikan perasaan subjektif tersebut (Kroger, 1997).

Dalam berbagai pengertian tersebut dapat dipertajam definisi tentang identitas sebagaimana yang dianjurkan oleh De Levieta dalam studi krisisnya tentang pandangan Erikson (Erikson, 1989)<sup>10</sup> ke dalam beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Identitas sebagai intisari seluruh kepribadian yang tetap sama walau berubah menjadi tua ataupun lingkungan sekitarnya berubah.
- b. Identitas sebagai keserasian peran sosial yang ada prinsipnya dapat berubah dan selalu berubah-ubah.

---

<sup>9</sup> Haralambos dan Holburn, *Sociology: Theme and Perspectives*, Vol. 5 (London: Colins, 2000), h. 885.

<sup>10</sup> Erikson, Erik, H, *Identitas Dan siklus Hidup Manusia; Bunga Rampai 1*. Penerjemah: Agus Cremers. [Jakarta: PT. Gramedia 1989]

- c. Identitas sebagai “gaya hidupku sendiri” yang berkembang dalam tahap-tahap terdahulu dan menentukan cara-cara bagaimana peran sosial ini harus diwujudkan.
- d. Identitas sebagai suatu perolehan khusus pada tahap adolesensi dan sebagai sesuatu yang sesudah pada tahap adolesensi senantiasa akan berubah dan diperbarui.
- e. Identitas sebagai pengalaman subyektifkan sesamaan serta kesinambungan batiniyah sendiri dalam ruang dan waktu.
- f. Identitas sebagai kesinambungan dengan diri sendiri dalam ruang dan waktu.

Identitas dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:<sup>11</sup> identitas budaya, identitas sosial dan identitas diri atau pribadi. Adapun tiga bentuk identitas tersebut yaitu:

#### 1) Identitas Budaya

Identitas budaya merupakan ciri yang muncul karena seseorang itu merupakan anggota dari sebuah kelompok etnik tertentu, itu meliputi pembelajaran tentang dan penerimaan tradisi, sifat bawaan, bahasa, agama, dan keturunan dari suatu kebudayaan.

#### 2) Identitas Sosial

Pengertian identitas harus berdasarkan pada pemahaman tindakan manusia dalam konteks sosialnya. Identitas sosial adalah

---

<sup>11</sup> Alo Liliwer, *Makna budaya dalam komunikasi antarbudaya*, [LKIS 2003]. Hal. 95



persamaan dan perbedaan, soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang lain.<sup>12</sup> Ketika kita membicarakan identitas di situ juga kita membicarakan kelompok. Kelompok sosial adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain dan terlibat dalam satu kegiatan bersama atau sejumlah orang yang mengadakan hubungan tatap muka secara berkala karena mempunyai tujuan dan sikap bersama; hubungan-hubungan yang diatur oleh norma-norma; tindakan-tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan kedudukan (status) dan peranan (*role*) masing-masing dan antara orang-orang itu terdapat rasa ketergantungan satu sama lain.<sup>13</sup>

### 3) Identitas Diri

Identitas umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, suatu kesatuan unik; kesatuan dan kesinambungan yang mengintegrasikan semua gambaran diri, baik yang diterima dari orang lain maupun yang diimajinasikan sendiri tentang apa dan siapa dirinya serta apa yang dapat dibuatnya dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Identitas diri seseorang juga dapat dipahami sebagai keseluruhan ciri-ciri fisik, disposisi yang dianut dan diyakininya serta daya-daya

---

<sup>12</sup> Cris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktik* [Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka], 221.

<sup>13</sup> Jabal Tarik Ibrahim, *Sosiologi Pedesaan* [Malang: UMM Press, 2003], 64.

kemampuan yang dimilikinya. Kesemuanya merupakan kekhasan yang membedakan orang tersebut dari orang lain dan sekaligus merupakan integrasi tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui sebelumnya.

## **2.2 Teori Budaya Politik**

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba mengaitkan budaya politik dengan orientasi dan sikap politik seseorang terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem politik. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba melihat bahwa dalam pandangan tentang objek politik, terdapat tiga komponen yaitu: Komponen Kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan seorang santri terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Komponen Afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. Komponen Evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang

---

<sup>14</sup> Gabriel A. Almon and Bingham Powell, *Comprative Politic A Developmental Approach* dikutip Rusadi Kantrapawira, *Budaya Politik*, 25

secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Gabriel A. Almond mengajukan pengklasifikasian budaya politik sebagai berikut:

1. Budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
2. Budaya politik kaula atau subyek, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif.
3. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.<sup>15</sup>

Konsep budaya politik muncul dan mewarnai wacana ilmu politik pada akhir Perang Dunia II, sebagai dampak perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat. Sebagaimana diungkapkan oleh banyak kalangan ilmuwan politik, setelah PD II selesai, di Amerika Serikat terjadi apa yang disebut revolusi dalam ilmu politik, yang dikenal sebagai Behavioral Revolution, atau ada juga yang menamakannya dengan Behavioralism.<sup>16</sup> Behavioral revolution terjadi dalam ilmu politik adalah sebagai dampak dari semakin menguatnya tradisi atau madzhab positivisme, sebuah paham yang percaya bahwa ilmu sosial mampu memberikan penjelasan akan gejala sosial seperti halnya ilmu-ilmu alam

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia*, [Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999], hlm 97.

memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam, dalam ilmu sosial, termasuk ilmu politik. Paham ini sangat kuat diyakini oleh tokoh-tokoh besar sosiologi, seperti Herbert Spencer, Auguste Comte, juga Emile Durkheim.

budaya politik adalah pola sikap, persepsi dan orientasi individu terhadap politik di antara anggota-anggota suatu sistem politik. Budaya politik merupakan sesuatu yang menentukan dan memberi erti pada tindakan-tindakan politik. Sementara itu Almond dan Powwel (1966, 1990) berpendapat bahwa orientasi atau persepsi individu itu terdiri daripada tiga komponen. Pertama, orientasi kognisi iaitu pengetahuan dan kepercayaan mengenai sistem politik, peranan dan pemegang peranan tersebut, disamping input serta output sistem politik. Hal-hal yang termasuk dalam kognisi itu tidak hanya berkaitan jumlah informasi, tetapi juga ketepatan dan kekhususannya, kemampuan untuk mengorganisasi dan memproses informasi itu. Individu mungkin memiliki tahap pengetahuan dalam ketepatan yang tinggi mengenai bagaimana seluruh sistem politik desentralisasi bekerja. Siapa tokoh politik yang mengambil peranan, berpengaruh yang kuat, persoalan-persoalan atau apa-apa agenda kebijaksanaan politik desentralisasi yang sedang hangat dibicarakan, dan sebagainya. Kedua, orientasi afektif, iaitu perasaan-perasaan keterikatan, keterlibatan, penolakan, pengasingan, dan sebagainya mengenai sistem politik, peranan, personel dan penampilan sistem politik. Orientasi ini meliputi intensiti dan kualiti yang berbeza, seperti marah, benci, bangga, senang, dan kecewa. Individu mungkin mempunyai perasaan terasing atau

penolakan terhadap sistem desentralisasi, barangkali disebabkan oleh keluarga atau sahabatnya mempunyai sikap seperti itu sehingga seseorang itu memberi tindak balas secara negatif terhadap politik desentralisasi. Pengalaman ini juga mungkin berpunca dari pengalaman yang menyenangkan yang mengakibatkan dia merasa ikut terlibat dalam proses politik sehingga dia memberikan respons yang wajar atau positif terhadap politik desentralisasi.

Ketiga, orientasi evaluasi, iaitu penilaian dan pendapat mengenai objek politik yang selalu melibatkan penerapan standard nilai terhadap objek dan kejadian politik atau kombinasi standard dan kriteria nilai dengan informasi dan perasaan. Contohnya, seorang elit Bugis mengadakan evaluasi atau mengkritik dasar politik desentralisasi sebagai tindakan responsif terhadap tuntutan politik anggota masyarakat berdasarkan nilai dan norma atau ideologi demokrasi.

Sementara itu, sub-budaya politik ialah tahap kepelbagaian budaya politik yang dikaji berkaitan dengan penyelidikan semasa empirikal. Mungkin akan ditemui adanya perbezaan variasi dalam sikap, persepsi yang cukup tinggi mungkin ditemui dalam kalangan objek-objek politik atau perbezaan-perbezaan yang mungkin muncul berdasarkan tahap pendidikan, wilayah, keanggotaan etnik, status sosial, status ekonomi, dan agama. Komponen-komponen budaya politik ini disebut sebagai subbudaya. Menurut Almond dan Verba (1990) lagi terdapat dua jenis subbudaya. Pertama, dasar sub-budaya, iaitu strata penduduk yang secara

tetap berorientasi dengan cara tertentu terhadap kebijaksanaan, tetapi secara tetap berorientasi pada struktur politik. Misalnya, ada sekelompok masyarakat yang menekankan pertumbuhan ekonomi dalam kebijaksanaan, sedangkan kelompok masyarakat lainnya menekankan pemerataan, sementara yang lain sebahagian masyarakat menekankan program-program pembangunan yang berskala besar dan bersifat sentralistik, sebahagian yang lainnya menekankan program-program pembangunan berskala kecil tetapi bersifat desentralistik. Kedua, subbudaya struktural, iaitu sebahagian penduduk yang berorientasi pelbagai struktur budaya politik seperti suku bangsa, agama, dan etnik, sementara sebahagian lagi berorientasikan struktur khusus dari sistem autoritarian terpusat. Masing-masing ini disebut sebagai “subbudaya parochial” dan “subbudaya subjek”.

Konsep lain yang digunakan oleh Almond dan Verba (1990) untuk mengaitkan mikro politik dengan makro politik adalah konsep peranan politik budaya (*role political culture*). Sistem politik yang lebih kompleks ini ditandai dengan struktur peranan yang lebih khusus seperti parlimen, eksekutif, birokrasi, pengadilan, ketenteraan, parti politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media komunikasi. Pusat pendiri dan berpengaruh dalam sistem politik ini disebut sebagai budaya peranan. Hal ini akan turut mempengaruhi kemajmukan budaya politik. Kemajmukan ini berasal daripada dua sumber utama. Pertama, elit yang melaksanakan peranan-peranan ini dapat direkrut daripada pelbagai subbudaya politik.

Kedua, proses induksi dan sosialisasi peranan yang menimbulkan nilai-nilai, norma-norma, keterampilan, kesetiaan, dan peta kognisi yang berbeza.

Oleh kerana peranan elit-elit tersebut begitu penting dalam formulasi dan pelaksanaan dasar politik desentralisasi, maka perbezaan yang wujud dalam kalangan mereka mungkin akan mempengaruhi penampilan politik desentralisasi. Pola perbezaan peranan dapat dibezakan melalui sama ada peranan-peranan itu melibatkan perbezaan dalam orientasi struktural (subbudaya parochial dan subjek), atau perbezaan itu hanya dalam orientasi kebijaksanaan. Dalam suatu sistem politik yang stabil, perbezaan-perbezaan dalam budaya peranan cenderung terbatas pada substansi kebijaksanaan, kerana legitimasi struktural sistem politik diterima dan disokong oleh masyarakat. Sebaliknya, dalam sistem politik yang stabil, perbezaan-perbezaan dalam budaya peranan cenderung bersifat struktural. Perbezaan-perbezaan ini akan menimbulkan pemecahan budaya dalam kalangan elit.

Tujuan Almond dan Verba (1990) menghubungkan mikro politik dengan makro politik adalah untuk mendapatkan suatu jenis budaya politik yang dapat mewujudkan suatu sistem politik demokrasi yang stabil iaitu budaya politik kewarganegaraan (civic culture). Teori ini telah diuji dengan membandingkan lima sistem politik demokrasi iaitu dari negara Itali, Jerman Barat, Mexico, Inggeris, dan Amerika Syarikat. Hasil ujaran tersebut menunjukkan bahawa sistem politik Amerika dan Inggeris adalah stabil

kerana kedua-duanya mempunyai budaya politik kewarganegaraan. Dengan kata lain, bahwa budaya politik adalah “jembatan” untuk menghubungkan antara micro politik ((sikap, orientasi dan persepsi) masyarakat dengan Macro Politik (kecenderungan; sistem, kecenderungan proses, dan kecenderungan kebijaksanaan) dalam suatu sistem politik.

### **2.3 Kesetaraan Gender Dalam Realitas Politik**

Memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan. Kesetaraan kesempatan dalam pengambilan keputusan akan mewujudkan kesetaraan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam kekuatan pengambilan keputusan. Pengalaman, minat, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki harus dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga semua kebijakan publik memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Perjuangan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen adalah salah satu strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik, terutama dalam pengambilan keputusan. Tujuan akhir dari perjuangan adalah mewujudkan kesetaraan gender dalam politik melalui peningkatan hubungan sosial.

Representasi perempuan di parlemen adalah untuk mencapai keadilan bagi perempuan dan laki-laki (keadilan gender) dalam semua aspek kehidupan. Tahapan kampanye pemilihan kepala daerah akan diikuti



oleh pasangan calon di seluruh Indonesia termasuk beberapa kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sayangnya, semua pasangan calon, hanya ada beberapa wajah perempuan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, dan sedihnya lagi, muncul dari jalur mandiri. Ini tentu saja berbeda dengan laki-laki, wajah perempuan menghiasi wajah-wajah politik yang diusung partai politik. Kurangnya (bisa dibilang begitu) wanita pada tahap pemilihan kepala daerah di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi jelas memicu beberapa pertanyaan dari para pejuang hak-hak perempuan dalam politik. Beberapa pertanyaan muncul, apakah stok tokoh politisi pemimpin perempuan di Indonesia sudah habis? Atau memang stok itu tersedia tetapi belum ada peluang untuk dinominasikan karena budaya patriarkal yang kuat di antara partai-partai politik internal, sehingga sulit untuk mengangkat kandidat dan wakil perempuan.

Persamaan gender dibidang hak-hak politik, merupakan hak Syar'i bagi perempuan. Jika dalam berbagai periode sejarah kehidupannya, perempuan tidak dapat menggunakan haknya, karena tidak memiliki kebutuhan yang disetujui untuk dipraktikkannya, atau karena perempuan-laki-laki dalam bidang ini mengunggulinya, itu tidak sesuai dengan hak politik perempuan yang tidak diharapkan. Bahkan, ia menjadi hak yang dituntut, dan tidak akan pernah dihapuskan. Dan diberbagai Negara perempuan masih melakukan desakan dan meminta atas hak-hak tersebut.

Hak-hak poli-tik adalah hak-hak yang ditetapkan dan disetujui oleh undang-undang atau konstitusi berdasar-kan keanggotaan sebagai warga negara.<sup>17</sup>

## **2.4 Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) merupakan konsekuensi pembagian wilayah Indonesia ke dalam wilayah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945. Pemilihan kepala daerah yang dikenal saat ini yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>18</sup> Seperti yang telah dikemukakan bahwa tiap-tiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah tersendiri. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>19</sup> Pembagian wilayah negara ke dalam daerah-daerah seperti disebutkan diatas diatur

---

<sup>17</sup> Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan, Men-elusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, [Jakarta: Penerbit Amzah, 2008], hlm. 34

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (22) UU nomor 8 tahun 2015

oleh suatu pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya berasal dari partai politik. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemberian otonomi daerah tidak lain adalah dalam rangka peningkatan kemakmuran dalam termasuk peningkatan perekonomian daerah. Tujuan pemberian otonomi daerah<sup>20</sup> adalah:

- 1) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah;
- 2) Untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan masyarakat pada masing-masing daerah;
- 3) Untuk meningkatkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat masing-masing daerah;
- 4) Untuk meningkatkan demokrasi kehidupan bangsa dan negara.

Menurut Sarundajang, pemberian otonomi kepada daerah mempunyai 4 (empat) tujuan<sup>21</sup> yaitu :

- 1) Dari segi politik adalah mengikut sertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan menuju proses demokrasi di lapisan bawah;

---

<sup>20</sup> Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, [Jakarta: Sinar Grafika 1997], hlm 110

<sup>21</sup> Sarundajang, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah*, [Pusaka Sinar Jaya, 2001], hlm. 130

- 2) Dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat;
- 3) Dari segi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak bergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhannya;
- 4) Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna pencapaian kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 56 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

- 1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>22</sup> Namun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tampaknya, yang paling menonjol disini adalah pemilihan Kepala Daerah dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Artinya rakyatlah yang secara langsung memilih siapa Kepala Daerah. Hal ini tentu saja merupakan terobosan baru dalam menafsirkan demokrasi yang ditentukan oleh konstitusi. Pasal 18 ayat (4) UUD Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjabarkan “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945 dengan menentukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

## **2.5 Kerangka Pikir**

Pemilihan kepala daerah selalu menyajikan pertunjukan yang menarik mulai dari strategi politik sampai pembasisan massa yang dimiliki,

---

<sup>22</sup> Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

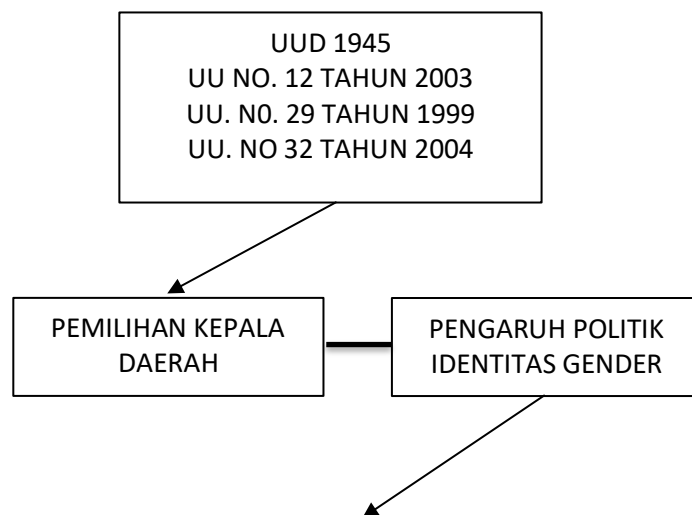
dalam hal ini peneliti tertarik untuk melihat proses yang terjadi pada Pilkada Kab. Mamuju yang akan dilaksanakan pada September 2020 mendatang dikarenakan Kab. Mamuju merupakan ibukota provinsi dari Sulawesi Barat dan tentunya akan ada banyak kepentingan politik di dalamnya, dan yang menambah ketertarikan saya ialah karena pada pelaksanaan pilkada di Kab. Mamuju kali ini akan menyajikan persaingan *head to head* antara petahana dan seorang calon bupati perempuan sehingga tentu akan menimbulkan penyusunan strategi yang berbeda karena salah satunya adanya perbedaan identitas gender antara petahan dan sang penantang. Sehingga dalam penelitian ini terfokuskan pada bagaimana pengaruh yang akan dihasilkan apabila adanya penggunaan sentiment identitas gender di masyarakat guna mencari simpati di Kab. Mamuju.

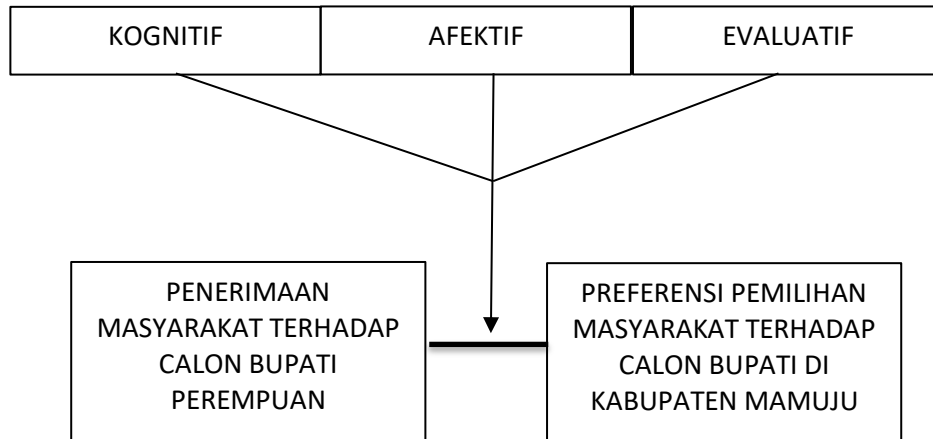
Pilihan masyarakat ini tentunya dapat dilihat atau dipandang dengan elemen-elemen yang dapat menimbang dan mengukur sebuah respon yaitu afektif, kognitif dan evaluatif. Elemen Afektif sendiri akan melihat pada bagaimana perasaan atau emosional seseorang atau kelompok dalam menyikapi sebuah isu sedangkan elemen kognitif melihat pada sudut pandang logika dan apa yang seharusnya atau apa yang tertulis. Selain itu nantinya penulis akan meriset secara keseluruhan dengan metode evaluasi.

Sehingga pada penelitian ini, penulis menggunakan skema berpikir yang menggunakan konsep mengenai politik identitas gender, bagaimana kemudian masyarakat memberikan tanggapan dari penggunaan sentimen identitas gender di Kab. Mamuju. Kemudian penulis akan menggunakan

pendekatan *behavioural*/tingkah laku, sehingga dapat melihat tingkah laku atau pandangan umum dari masyarakat di Kab. Mamuju yang digambarkan dalam kerangka konsep sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Pikir**





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berfokus pada politik identitas gender dalam menghadapi pemilihan kepala daerah di kabupaten mamuju tahun 2020. Agar dapat menerapkan metode ilmiah dalam penelitian ini maka diperlukan suatu desain penelitian, yang mampu memahami situasi secara mendalam, menemukan pola dan sesuai dengan kondisi penelitian yang akan